

## Jangan Tunda Trans-Sumatera

Setelah tertunda 1,5 tahun, pembangunan tol Trans-Sumatera sepanjang 2.696 kilometer diharapkan segera dimulai. Melihat perkembangan terakhir, semua faktor yang mendukung realisasi proyek senilai Rp 360 triliun ini sudah ada masalah lagi. Kontraktor sudah siap, pendanaan tidak ada masalah, pembebasan lahan juga tidak ada kendala.

Satu-satunya yang menjadi pertanyaan adalah komitmen pemerintah. Jika pemerintah berkomitmen, pembangunan megaprojek ini bisa *ground-breaking* atau mulai konstruksi tahun depan dan selesai 2025. Jika pemerintah serius membangun infrastruktur, tol Trans-Sumatera dapat terealisasi sesuai rencana.

Oleh karena proyek ini kurang layak secara finansial, tapi strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerintah menunjuk badan usaha milik negara (BUMN) untuk membangunnya. Proyek ini, walaupun ditender, tidak akan ada swasta yang mau, karena tingkat pengembalian investasi (*internal rate of return/IRR*) tol Trans-Sumatera hanya 6-13%.

PT Hutama Karya (HK) yang belum *go public* kini ditugaskan membangun jalan tol Trans-Sumatera. Kementerian BUMN juga harus mengubah lini bisnisnya dari BUMN konstruksi menjadi operator jalan tol. Namun, BUMN tersebut tidak boleh melakukan pelepasan saham ke publik melalui penawaran umum saham perdana (IPO). BUMN karya ini harus tetap dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah dan menjadi agen pembangunan (*agent of development*).

Dengan perencanaan dan studi kelayakan yang baik, pembangunan tol Trans-Sumatera dipastikan meningkatkan konektivitas antardaerah dan mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru. Sumatera yang kaya aneka sumber daya alam akan menjadi kekuatan ekonomi yang dahsyat, bahkan mengalahkan Pulau Jawa. Jawa yang sudah *over exploited* hingga kini masih menjadi andalan ekonomi nasional, dengan menyumbang 57,51% produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sedangkan Sumatera baru sebesar 23,91%, Kalimantan 9,03%, Sulawesi 4,86%, dan sisanya 4,69% dari pulau-pulau lain.

HK sudah siap mengerjakan pembangunan Trans-Sumatera mulai 2014. BUMN ini akan memulai dengan membangun tiga ruas jalan tol tahun depan, yakni ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, kemudian Bakauheni-Bandar Lampung dan Palembang-Indralaya.

Jika keseluruhan 22 ruas tol Trans-Sumatera mencapai 2.696 kilometer dengan target selesai 2025, itu berarti tiap tahun HK harus membangun ruas tol sepanjang 225 kilometer. HK yang ditunjuk membangun jalan tol itu akan mendapatkan dukungan dana dari pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 15 triliun.

Tahun ini HK membutuhkan dana PMN sebesar Rp 5 triliun guna meningkatkan likuiditas perusahaan dan tahun berikutnya ada pengucuran lagi. Oleh karena Undang-Undang APBN 2013 yang telah disahkan DPR tidak memasukkan PNM bagi HK, anggarannya kemungkinan dimasukkan dalam APBN Perubahan.

Sedangkan sumber pembiayaan proyek *multiyears* ini masih dibahas di Kementerian Keuangan. Sejumlah opsi tengah dibicarakan, seperti pola pembangunan menggunakan porsi 30% ekuitas dan 70% pinjaman, PNM murni, atau divestasi (selesai dibangun, ruas tol tersebut langsung dijual). Dengan adanya dana dukungan pemerintah atau *viability gap funding* (VGF), pendanaan dari bank-bank BUMN pun bisa diperoleh.

Opsi lain untuk pembangunan jalan tol adalah menerbitkan obligasi, baik yang dilakukan pemerintah maupun HK. Opsi semacam ini banyak sukses di negara lain, seperti Malaysia yang kini mempunyai jalan tol jauh lebih panjang dari Indonesia.

Pembebasan lahannya akan dipercepat dengan menggunakan lahan milik BUMN perkebunan. HK juga berencana bekerja sama dengan pemerintah daerah, melalui pendirian anak usaha. Kerja sama saling menguntungkan dalam payung pemerintahan ini membuat biaya pengadaan tanah juga dapat ditekan lebih rendah.

Dengan faktor-faktor yang sudah sangat mendukung pembangunan Trans-Sumatera itu, kini tinggal komitmen pemerintah yang dibutuhkan. Pemerintah harus segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, untuk mengakomodasi penunjukan langsung pemerintah terhadap BUMN untuk membangun jalan tol. Semula, PP yang memungkinkan penugasan HK untuk menggarap tol Trans-Sumatera diharapkan selesai Januari lalu.

Draf revisi PP itu sudah berada di Sekretariat Kabinet, tinggal diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan presiden mengenai penunjukan langsung HK untuk pengerjaan proyek jalan bebas hambatan itu juga harus dikeluarkan. □